

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang beroperasi di wilayah Pulau Jawa. KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang (Theodorus M. Tuanakotta, 2015, p. 10). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dalam pemberian jasa profesionalnya. KAP memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, terutama dalam mendukung kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, teknologi telah mendorong transformasi dalam proses audit, memungkinkan auditor untuk menggunakan berbagai perangkat dan sistem berbasis teknologi yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas audit. Teknologi memungkinkan auditor untuk mempercepat pengumpulan bukti, melakukan analisis data lebih mendalam, serta mendokumentasikan temuan audit secara lebih sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, teknologi harus dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti prosedur audit fisik. Audit tetap dilakukan oleh auditor, bukan oleh sistem. Ini karena adanya professional judgement yang hanya dapat dilakukan oleh auditor berlisensi untuk menilai dan memverifikasi data yang ada.

Prosedur lapangan yang memerlukan kehadiran langsung auditor, seperti stock opname yang diatur dalam ISA 501 – Audit Evidence—Specific Considerations for Selected Items, konfirmasi saldo piutang, utang, dan kas sebagaimana diatur dalam ISA 505 – External Confirmations, pemeriksaan aset tetap secara fisik, dan pengujian lainnya, tetap tidak dapat digantikan oleh teknologi semata. Standar-standar tersebut menegaskan bahwa prosedur audit tertentu membutuhkan observasi langsung dan konfirmasi independen untuk memperoleh bukti audit yang

cukup dan tepat. Prosedur-prosedur ini merupakan bagian integral dari proses audit yang memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi yang dilaporkan. Meskipun teknologi dapat membantu memfasilitasi dan mempercepat sebagian besar tahapan audit, auditor tetap bertanggung jawab untuk menerapkan professional judgement dalam menilai bukti yang dikumpulkan, sebagaimana ditegaskan dalam ISA 200 – Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing.

Pulau Jawa merupakan wilayah dengan konsentrasi ekonomi tertinggi di Indonesia. Provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menjadi pusat aktivitas bisnis dan keuangan nasional. Wilayah ini menjadi lokasi berbagai jenis entitas bisnis, mulai dari perusahaan multinasional hingga UMKM. Oleh karena itu, KAP yang beroperasi di Pulau Jawa berhadapan dengan kebutuhan klien yang beragam, serta dituntut untuk mampu menyesuaikan proses audit agar efisien dan tetap berkualitas di tengah perkembangan teknologi.

Sebagian besar KAP di Pulau Jawa terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang merupakan organisasi profesi yang memberikan pengakuan resmi dan pembinaan terhadap para akuntan publik. IAPI berperan aktif dalam menyediakan pelatihan, pengawasan, serta penyusunan standar profesi, termasuk mendorong modernisasi praktik audit di Indonesia. IAPI juga mendukung pergeseran dari audit konvensional ke audit yang berbasis teknologi, serta memastikan kompetensi digital auditor ditingkatkan untuk menghadapi transformasi teknologi yang pesat.

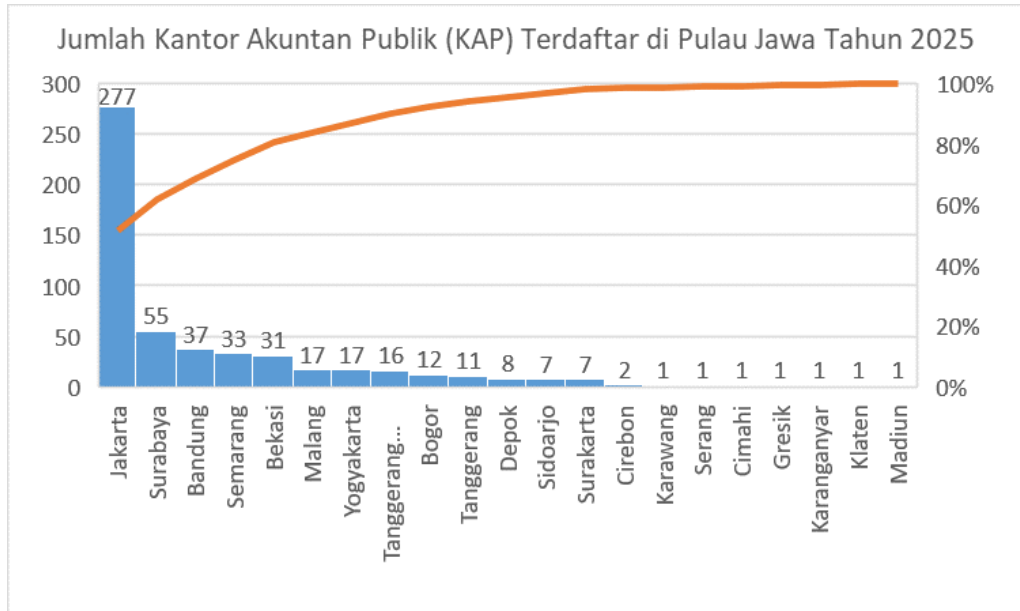
Sejak didirikan pada tahun 1957, IAPI telah menunjukkan kontribusi penting dalam perkembangan profesi akuntan publik. Pada 1977, IAPI mulai mengembangkan standar profesi akuntansi sesuai dengan kebutuhan global, dan pada 1994 bergabung dalam organisasi internasional untuk memperkuat posisi akuntansi Indonesia. Tahun 2011 menjadi tonggak peningkatan pengawasan dan kompetensi anggota IAPI, serta pada 2023, organisasi ini memperbarui regulasi guna menyesuaikan dengan perkembangan audit berbasis teknologi dan kebutuhan transformasi digital di industri keuangan, serta untuk mendukung pengembangan kompetensi digital auditor.

Pandemi COVID-19 telah menjadi katalis yang mempercepat pemanfaatan teknologi digital dalam audit, mendorong auditor untuk mengoptimalkan penggunaan sistem dan aplikasi berbasis teknologi dalam setiap tahap proses audit. Menurut Technical Newsflash April 2020 yang diterbitkan oleh IAPI, auditor diminta untuk memodifikasi prosedur pengumpulan bukti dan menyesuaikan prosedur audit yang telah direncanakan dengan dukungan teknologi, guna menjaga kelancaran proses audit di tengah keterbatasan mobilitas. IAPI juga menekankan pentingnya memperkuat keamanan data dan memastikan adaptasi prosedur audit sejalan dengan perkembangan teknologi, sehingga efektivitas audit berbasis teknologi tetap terjaga. Meskipun teknologi semakin terintegrasi, penerapan professional judgement oleh auditor tetap menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa hasil audit memenuhi standar kualitas dan keandalan yang berlaku.

Berdasarkan data per tanggal 21 Januari 2025, jumlah seluruh anggota IAPI sebanyak 7.007 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.646 Anggota Biasa (Akuntan Publik), 2.211 Anggota Madya (pemegang CPA non-Akuntan Publik), serta 687 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, anggota IAPI yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi 851 orang di sektor Pasar Modal, 640 orang di sektor Perbankan, dan 636 orang di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Sedangkan, jumlah KAP yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mencapai 299 KAP. Data dan informasi yang dicantumkan dalam Buku Direktori 2025 serta perubahannya terkini dapat diakses melalui website IAPI di www.iapi.or.id.

Distribusi ini semakin menegaskan relevansi pemilihan Pulau Jawa sebagai objek penelitian, mengingat wilayah ini mewakili dinamika nyata dalam praktik audit yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, kompetensi profesional, serta kebutuhan akan adaptasi prosedur yang sesuai dengan audit berbasis digital. Berdasarkan data dari situs resmi IAPI tahun 2025, terdapat 537 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar dan aktif di wilayah Pulau Jawa. Distribusi ini menunjukkan konsentrasi tertinggi berada di DKI Jakarta (277 KAP), diikuti oleh Surabaya (55 KAP), Bandung (37 KAP), dan Semarang (33 KAP). Sebaran ini

mencerminkan intensitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan audit yang tinggi di kota-kota besar. Visualisasi distribusi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. 1

Jumlah (KAP) Terdaftar di Pulau Jawa Tahun 2025

Sumber: www.iapi.or.id (2025)

Grafik di atas menunjukkan distribusi KAP yang terdaftar di Pulau Jawa pada tahun 2025, dengan konsentrasi tertinggi berada di DKI Jakarta (277 KAP), diikuti oleh Surabaya, Bandung, dan Semarang. Hal ini mencerminkan intensitas aktivitas ekonomi yang lebih besar di ibu kota serta kota-kota besar lainnya, yang memiliki banyak entitas bisnis dan klien yang membutuhkan layanan audit. Konsentrasi KAP yang tinggi di wilayah ini juga menunjukkan kebutuhan audit yang tinggi dan kompleks, yang semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dalam mendigitalisasi proses audit. Mengingat pesatnya perkembangan sektor industri di wilayah ini, penerapan audit berbasis digital semakin relevan dan penting untuk menangani volume dan kompleksitas pekerjaan audit.

Sebaran ini menegaskan relevansi pemilihan Pulau Jawa sebagai objek penelitian, mengingat wilayah ini mewakili dinamika nyata dalam praktik audit yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, kompetensi profesional, serta kebutuhan untuk adaptasi prosedur audit berbasis digital.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, praktik audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) mengalami transformasi signifikan. Pandemi COVID-19 menjadi katalis percepatan pemanfaatan teknologi dalam audit, mendorong KAP untuk mengintegrasikan sistem dan perangkat berbasis digital dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Pada Maret 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi (Aulia et al., 2021). Menyusul hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang membatasi interaksi fisik dan aktivitas tatap muka. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa 13% dari 9.000 perusahaan di Indonesia memilih untuk mempertahankan metode kerja jarak jauh, termasuk sektor keuangan dan asuransi yang mengandalkan teknologi untuk memastikan kelancaran operasional dan pelaporan keuangan. Dalam konteks ini, laporan keuangan yang berkualitas tetap membutuhkan proses audit untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan (Sari et al., 2022). Audit berbasis teknologi memfasilitasi pengumpulan bukti, analisis data, dan dokumentasi hasil pemeriksaan secara lebih efisien, sehingga auditor tetap dapat mengidentifikasi potensi kecurangan atau penyimpangan yang menjadi bahan evaluasi penting bagi klien, meskipun terdapat keterbatasan mobilitas.

Transformasi digital ini sejalan dengan tren global di mana berbagai sektor, termasuk jasa profesional seperti audit, semakin mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keberlanjutan. (Riyadh et al., 2025) menekankan bahwa digitalisasi pasca-pandemi tidak hanya mengubah model bisnis, tetapi juga memperkuat peran teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data analytics, dan blockchain dalam mendukung keberlanjutan ekonomi serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Inovasi digital telah terbukti mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data, akurasi laporan, serta inklusi layanan, namun juga membawa tantangan baru seperti keamanan data, regulasi, dan kesenjangan kompetensi digital. Dalam konteks audit, hal ini berarti bahwa KAP

perlu memastikan bahwa integrasi teknologi dilakukan secara strategis, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keandalan, dan akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zahrawati et al., 2021) mengenai pelaksanaan audit selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mengacu pada Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-XII.2/5/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Keuangan pada Masa Darurat. Keputusan ini mendorong auditor untuk menyesuaikan metode pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi, termasuk penggunaan aplikasi kolaborasi, sistem manajemen dokumen digital, dan platform komunikasi daring, guna memastikan kelancaran proses audit. Hal ini sejalan dengan temuan (Nakrošienė et al., 2019) yang mengungkapkan bahwa penerapan teknologi dalam pekerjaan jarak jauh memiliki dampak pada produktivitas, kepuasan kerja, dan peluang karier. Meskipun teknologi menawarkan fleksibilitas waktu, efisiensi biaya, dan peningkatan kemandirian, tantangan tetap muncul terkait komunikasi, koordinasi tim, dukungan supervisor, serta keamanan dan akses dokumen organisasi. Dalam konteks audit berbasis teknologi, keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas hasil audit apabila infrastruktur teknologi tidak memadai, kompetensi digital auditor belum optimal, atau prosedur audit belum sepenuhnya diadaptasi untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep audit berbasis teknologi yang ideal dan penerapannya di lapangan.

Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya infrastruktur kerja yang memadai, yang berpengaruh terhadap kepuasan dan produktivitas tenaga kerja (Nakrošienė et al., 2019). Faktor-faktor seperti ketersediaan fasilitas kerja yang nyaman, dukungan dan kepercayaan dari atasan, serta fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja, diidentifikasi sebagai elemen kunci yang memengaruhi kualitas hasil kerja. Mengadaptasi temuan ini dalam konteks audit berbasis teknologi di KAP, dapat dipahami bahwa penerapan sistem dan prosedur berbasis digital perlu didukung oleh infrastruktur teknologi yang andal, lingkungan kerja yang kondusif, serta koordinasi yang efektif antara auditor dan pihak terkait. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, efektivitas audit berbasis teknologi berpotensi menurun, meskipun teknologi telah diintegrasikan dalam proses audit.

Dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan, auditor dapat tetap melaksanakan pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi sebagai pendukung utama proses audit. Namun, audit berbasis teknologi juga menghadapi tantangan, khususnya dalam pengumpulan bukti audit yang relevan dan andal. Menurut (Al-Aamaedeh & Alhosban, 2021), bukti audit merupakan salah satu komponen paling krusial dalam proses audit, terutama jika diperoleh langsung melalui pemeriksaan fisik oleh auditor. Bukti fisik umumnya memiliki tingkat keyakinan yang tinggi, karena auditor dapat secara langsung memverifikasi keberadaan dan kondisi aset atau dokumen. Sebaliknya, bukti audit yang diperoleh dalam bentuk digital dari klien berpotensi menimbulkan risiko ketidaksesuaian data apabila tidak diverifikasi secara memadai. Oleh karena itu, strategi pengumpulan bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup, sebagaimana disarankan oleh Yulizar et al. (2020) dalam (Ismanidar et al., 2023), menjadi sangat penting.

Praktik audit berbasis teknologi mengandalkan infrastruktur digital seperti perangkat lunak audit berbasis cloud, video conference, dan berbagai alat komunikasi daring untuk mendukung proses pemeriksaan. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, koordinasi tim, dan percepatan proses audit. Namun, tantangan tetap muncul, antara lain dalam memastikan efektivitas komunikasi, menjaga keamanan serta kerahasiaan data yang diaudit, dan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi kualitas hasil audit. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian prosedur audit yang selaras dengan pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi digital auditor agar proses audit dapat berjalan efektif, efisien, dan tetap memenuhi standar profesional. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh infrastruktur teknologi, kompetensi digital auditor, dan adaptasi prosedur terhadap efektivitas audit berbasis teknologi pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Pulau Jawa tahun 2025.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas topik terkait pemanfaatan teknologi dalam audit, masih terdapat celah signifikan dalam literatur mengenai pengaruh faktor-faktor seperti infrastruktur teknologi, kompetensi digital

auditor, dan adaptasi prosedur audit terhadap efektivitas audit berbasis teknologi. Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada implementasi teknologi secara umum, namun belum banyak yang mengkaji secara spesifik dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut secara simultan. Berdasarkan (Yohanes Mario Pratama, 2022), pengalaman proses audit selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa praktik audit di masa depan akan semakin memadukan metode tradisional dengan teknologi digital. Perbedaan antara konsep audit konvensional yang mengandalkan tatap muka penuh dengan audit berbasis teknologi yang mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam verifikasi data dan komunikasi dengan klien. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana infrastruktur teknologi yang memadai, kompetensi digital auditor, dan adaptasi prosedur audit dapat meningkatkan efektivitas audit berbasis teknologi.

Dalam praktik audit berbasis teknologi, infrastruktur digital yang kuat dan aman memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi proses audit. (Ismanidar et al., 2023) menekankan bahwa infrastruktur yang memadai, seperti perangkat lunak berbasis cloud, aplikasi berbagi data, dan sistem komunikasi berbasis video, memungkinkan auditor melaksanakan prosedur audit secara real-time tanpa kendala lokasi. Namun, tantangan muncul dalam hal keamanan informasi, karena semakin banyak data sensitif dibagikan secara daring. Sebagaimana diatur dalam ISO 19011:2018 Guidelines for Auditing Management Systems penerapan prosedur audit berbasis teknologi harus memastikan integritas data yang dikumpulkan serta mengantisipasi potensi risiko keamanan selama pengumpulan bukti audit secara elektronik.

Kompetensi digital auditor merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan audit berbasis teknologi. Seiring dengan perkembangan pesat di bidang teknologi, auditor tidak hanya dituntut memahami standar audit tradisional, tetapi juga harus memiliki keterampilan digital untuk beradaptasi dengan alat dan prosedur berbasis teknologi. (Khoirunnisa et al., 2021) menyatakan

bahwa auditor dengan keterampilan digital yang tinggi lebih mampu mengoptimalkan penggunaan perangkat analitik untuk mendeteksi anomali dan risiko dengan lebih cepat dibandingkan metode audit konvensional.

Selain kompetensi teknis, adaptasi prosedur audit berbasis teknologi juga menjadi tantangan penting. (Teeter et al., 2010) menjelaskan bahwa penerapan teknologi seperti analisis data terotomatisasi dan audit berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi dengan mengotomatiskan sebagian proses audit. Namun, adaptasi prosedur semacam ini membutuhkan waktu, pelatihan, dan kesiapan sumber daya manusia agar auditor dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.

Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan audit berbasis teknologi terletak pada menjaga keseimbangan antara kemudahan yang ditawarkan teknologi dan risiko yang ditimbulkannya, seperti keamanan informasi dan ketergantungan pada sistem digital. (Ari Kristiana, 2021) menekankan bahwa penggunaan VPN, enkripsi, dan sistem keamanan berbasis perangkat keras harus menjadi bagian integral dari infrastruktur audit digital untuk memitigasi risiko yang dapat merusak kualitas hasil audit dan reputasi KAP.

Sebagai tambahan, meskipun audit berbasis teknologi menawarkan banyak keuntungan, interaksi fisik yang terbatas dengan pihak yang diaudit dapat memengaruhi kualitas wawancara dan inspeksi langsung, yang merupakan aspek penting untuk memperoleh bukti audit yang kuat dan sah (Sanusi Ariyanto, 2022). (Rizka Khoirotun Nisaa et al., 2024) menegaskan bahwa kompetensi digital memungkinkan auditor mengelola teknologi analitik canggih, AI, dan natural language processing untuk melakukan analisis prediktif, mengidentifikasi potensi risiko, serta mendeteksi anomali secara lebih efisien.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen, baik secara parsial maupun simultan, terhadap efektivitas audit berbasis teknologi.

Dengan adanya perubahan signifikan dalam cara kerja auditor di era digital, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh infrastruktur teknologi,

kompetensi digital auditor, dan adaptasi prosedur audit berbasis teknologi sebagai faktor utama yang memengaruhi efektivitas audit berbasis teknologi pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Pulau Jawa tahun 2025. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis terkait penerapan audit berbasis teknologi di lapangan, sehingga hasil audit tetap memenuhi standar profesional, efisien, dan relevan dengan perkembangan teknologi terkini.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, terlihat bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik audit di Kantor Akuntan Publik (KAP). Integrasi teknologi, seperti perangkat lunak berbasis *cloud*, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), analisis data besar (*Big Data Analytics*), dan platform komunikasi digital, telah mempermudah proses pemeriksaan laporan keuangan. Namun, pemanfaatan teknologi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi, kompetensi digital auditor, dan kemampuan dalam mengadaptasi prosedur audit agar sesuai dengan lingkungan berbasis teknologi.

Audit berbasis teknologi berkembang sebagai solusi untuk memastikan proses pemeriksaan tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan mobilitas, seperti yang dialami saat pandemi COVID-19. Sama halnya dengan Learning Management System (LMS) yang memfasilitasi pembelajaran daring di dunia pendidikan, teknologi audit memungkinkan auditor melakukan prosedur pemeriksaan secara efisien tanpa tatap muka langsung dengan klien.

Meskipun demikian, beberapa kendala masih muncul. Infrastruktur teknologi yang kurang memadai seperti perangkat lunak yang tidak optimal dan koneksi jaringan yang tidak stabil dapat menghambat kelancaran proses audit. Kompetensi digital auditor juga menjadi faktor kunci; auditor yang terampil dalam teknologi digital dapat beradaptasi lebih cepat dengan prosedur audit berbasis teknologi, sedangkan yang kurang terampil akan menghadapi hambatan dalam memanfaatkannya.

Selain itu, keamanan data merupakan isu yang tidak dapat diabaikan. Penggunaan platform digital untuk berbagi bukti audit meningkatkan risiko

kebocoran atau manipulasi informasi. Oleh karena itu, sistem pengamanan yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi data sensitif yang dikumpulkan selama audit. ISO 19011:2018 Guidelines for Auditing Management Systems menegaskan bahwa prosedur audit berbasis teknologi harus memastikan integritas data dan mengantisipasi potensi risiko keamanan yang dapat memengaruhi kualitas hasil audit.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Pulau Jawa tahun 2025?
2. Bagaimanakah pengaruh infrastruktur teknologi, kompetensi digital auditor, dan adaptasi prosedur audit berbasis teknologi terhadap efektivitas audit berbasis teknologi di KAP wilayah Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan infrastruktur teknologi, kompetensi digital auditor, dan adaptasi prosedur audit berbasis teknologi terhadap efektivitas audit berbasis teknologi di KAP wilayah Pulau Jawa?
4. Apakah secara parsial:
 - a. Infrastruktur teknologi berpengaruh terhadap efektivitas audit berbasis teknologi di KAP wilayah Pulau Jawa?
 - b. Kompetensi digital auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit berbasis teknologi di KAP wilayah Pulau Jawa?
 - c. Adaptasi prosedur audit berbasis teknologi berpengaruh terhadap efektivitas audit berbasis teknologi di KAP wilayah Pulau Jawa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik responden pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Pulau Jawa tahun 2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur teknologi, kompetensi digital auditor, dan adaptasi prosedur audit berbasis teknologi terhadap efektivitas audit berbasis teknologi di KAP wilayah Pulau Jawa.

3. Untuk menguji pengaruh secara simultan infrastruktur teknologi, kompetensi digital auditor, dan adaptasi prosedur audit berbasis teknologi terhadap efektivitas audit berbasis teknologi di KAP wilayah Pulau Jawa.
4. Untuk menguji pengaruh secara parsial, yaitu:
 - a. Mengetahui pengaruh infrastruktur teknologi terhadap efektivitas audit berbasis teknologi di KAP wilayah Pulau Jawa.
 - b. Mengetahui pengaruh kompetensi digital auditor terhadap efektivitas audit berbasis teknologi di KAP wilayah Pulau Jawa.
 - c. Mengetahui pengaruh adaptasi prosedur audit berbasis teknologi terhadap efektivitas audit berbasis teknologi di KAP wilayah Pulau Jawa.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak.

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori audit, khususnya dalam konteks audit berbasis teknologi. Penelitian ini memperkaya literatur yang ada mengenai pengaruh infrastruktur teknologi, kompetensi digital auditor, dan adaptasi prosedur audit terhadap efektivitas audit berbasis teknologi. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas audit yang sesuai dengan standar profesional.

2. Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai audit berbasis teknologi, keamanan data, serta penerapan teknologi digital dalam proses audit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang penelitian lanjutan untuk menggali tantangan dan peluang penerapan teknologi di bidang audit, baik pada skala nasional maupun internasional.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi KAP, khususnya di wilayah Pulau Jawa, mengenai bagaimana infrastruktur teknologi, kompetensi digital auditor, dan adaptasi prosedur audit dapat mempengaruhi efektivitas audit berbasis teknologi. Hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas audit, mengoptimalkan penggunaan teknologi, serta memperkuat keamanan data dan kerahasiaan informasi dalam pelaksanaan audit.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi audit. Hasil penelitian juga dapat membantu pemerintah dalam merancang standar pengamanan dan prosedur yang mendukung penerapan audit berbasis teknologi sambil menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diaudit. Dengan adanya audit berbasis teknologi yang efektif, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan perusahaan dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan urutan isi laporan penelitian, sehingga pembaca dapat memahami alur pembahasan dari awal hingga akhir. Penyusunan sistematika ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap bagian tersusun secara logis, runtut, dan saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang berisi penjelasan variable penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.